

Efisiensi *Baitul Māl wat Tamwīl* (BMT) Pesantren di Indonesia

Atika Rukminastiti Masrifah
Universitas Darussalam Gontor

email: atikamasrifah@unida.gontor.ac.id

Abstract

Pesantren and Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) are not seemingly equal things to compare. The first focuses on spiritual and religious education, while the latter concentrates on the economic and financial activities. Nevertheless, Pesantrens have been considering the significance of economic development and empowerment, through a micro-finance institution. Hence, the analysis of its performance, in particular, the efficiency level is inevitable. This paper attempts to analyze the technical efficiency (including pure technical and scale efficiencies) of some Pesantren BMTs by using Data Envelopment Analysis (DEA). Additionally, this article also analyses the role of Pesantren BMTs for developing Micro-Enterprises (MEs), as well as to analyse the roles of Pesantren BMT in ME's wealth management. The results show that: first, generally, the efficiency of Pesantren BMTs is relatively low. Scale efficiency also indicates that operating of BMTs are still far from the optimal scale. Moreover, the average technical efficiencies (TE), scale efficiency (SE) and pure technical efficiency (PTE) of Pesantren BMTs in terms of intermediation have always been higher than those in terms of production. The possible improvements for inefficient Pesantren BMTs include increasing debtors (Y1) and total financing (Y2). They have to always been struggling to collect sizeable depositors, especially MEs, as well as total financing as their main purpose to empower them and enhance their economic development. The other possible improvements are to increase the collection (X4) and the distribution funds of ZISWAF (Y3). This result suggests that most Pesantren BMTs still focus on baitut tamwīl activities, extending financing as their main business. While the future, BMTs should play a more active role in baitul māl activities as their primary business. Second, Pesantren BMTs are useful for developing MEs and contribute a tremendous social benefit to society in several ways. Although the efficiency of BMTs is relatively low, since generally, BMTs have achieved both profit and social benefit. Therefore, Islamic financing might be an appropriate model for MEs.

Keywords: Pesantren, Baitul Māl wat Tamwīl, Micro Enterprises, Efficiency.

Abstrak

Pesantren dan Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) terkadang dianggap bukan padanan yang cocok untuk dibandingkan, Pesantren berada di ranah ilmu pengetahuan dan keagamaan, sedangkan Koperasi berada ranah ekonomi. Namun perjalanan waktu membuktikan bahwa Pesantren serius dalam mengembangkan sebuah jaringan perekonomian melalui Baitul Māl wa Tamwīl, sehingga mengukur efisiensi BMT Pesantren adalah suatu keharusan. Kajian ini mencoba untuk menganalisis efisiensi teknis dari beberapa BMT Pesantren menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA), menganalisis peran BMT Pesantren untuk mengembangkan UM, serta menganalisis peran BMT Pesantren dalam pengelolaan harta UM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, efisiensi BMT Pesantren yang diamati masih relatif rendah. Efisiensi skala juga menunjukkan bahwa operasional BMT Pesantren masih jauh dari skala optimal. Selain itu efisiensi teknis rata-rata (TE), efisiensi skala (SE) dan efisiensi murni teknis (PTE) BMT Pesantren dalam hal intermediasi selalu lebih tinggi dibandingkan pendekatan produksi. Kemungkinan adanya perbaikan untuk BMT Pesantren yang tidak efisien diantaranya adalah meningkatkan jumlah nasabah pembiayaan (Y1) dan total pembiayaan (Y2). BMT Pesantren harus berusaha untuk mendapatkan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, terutama UM, serta peningkatan total pembiayaan, sebagaimana tujuan utama adanya BMT Pesantren adalah untuk memberdayakan UM dan meningkatkan keadaan ekonomi mereka. Perbaikan lain yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan penghimpunan (X4) dan penyaluran dana ZISWAF (Y3). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar BMT Pesantren masih fokus pada kegiatan baitul tamwīl, memperluas pembiayaan sebagai bisnis utama mereka. Sementara kedepannya, BMT Pesantren diharapkan bisa memainkan peran yang lebih aktif dalam kegiatan baitul māl. Kedua, BMT Pesantren sangat bermanfaat untuk mengembangkan UM dan berkontribusi untuk kemaslahatan masyarakat. Meskipun efisiensi BMT Pesantren relatif rendah, tetapi jika BMT Pesantren bergerak untuk kemanfaatan di bidang ekonomi sekaligus sosial, maka pembiayaan syariah dapat diprediksi menjadi lebih berkelanjutan bagi UM jika melalui BMT Pesantren.

Kata Kunci: Pesantren, Baitul Māl wat Tamwīl, Micro Enterprises, Efficiency.

Pendahuluan.

Indonesia merupakan negara yang sektor perekonomiannya didominasi oleh Usaha Mikro (UM). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), jumlah UM di Indonesia mencapai 63,35 juta unit atau 98.68% dari total Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

dan Usaha Besar (UB) pada tahun 2018.¹ Dari sisi penyerapan lapangan kerja, UM mampu menyerap hampir 107,38 juta atau 97% tenaga kerja di Indonesia.

Tabel 1. Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2018*)**

	Unit Usaha		PDB	Tenaga Kerja		Ekspor
Mikro	63.350.222	98.68%	37.77%	107.376.540	97.00%	1.22%
Kecil	783.132	1.22%	9.60%	5.831.256	4.84%	2.30%
Menengah	60.702	0.09%	13.70%	3.770.835	3.13%	10.85%
Besar	5.550	0.01%	38.93%	3.619.507	3.00%	85.63%

***) Angka Sangat-sangat Sementara
Sumber: depkop.go.id (Statistik UMKM, 2018).

Usaha mikro dari segi jumlah merupakan yang terbesar dari keseluruhan perusahaan di Indonesia. Namun, kontribusinya kepada perekonomian Nasional belum sebesar perusahaan-perusahaan besar. Penyebab utama UM belum dapat berkembang ialah ketidakmampuan dalam mengelola hartanya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala,² antara lain: kelemahannya dalam manajemen keuangan, dikelola dengan manajemen keluarga yang umumnya lemah dalam pengendalian, terbatasnya akses informasi dan sumber keuangan serta tidak dikuasainya jalur distribusi.

Dengan karakteristiknya yang khas, yaitu modal yang rendah, tidak terlalu banyak tergantung pada faktor eksternal seperti bahan baku impor, organisasi yang ramping dan fleksibel, manajemen yang sederhana, serta ditunjang dengan volume usaha tersebar di seluruh Indonesia, maka mendorong UM lebih tahan terhadap adanya fluktuasi dalam siklus bisnis.³ Kondisi ini semakin mendorong banyaknya lembaga keuangan mikro yang bermunculan di Indonesia. Dalam praktiknya, telah berkembang berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) maupun yang konvensional, secara khusus dapat melayani UM, termasuk

1 Kementerian Koperasi Dan UKM, "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018," depkop.go.id, 2018, <https://tinyurl.com/ydep44lf>, diakses pada 23 Mei 2019.

2 Edi Setijawan dan M. E. Siregar, "Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Mikro," *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro* (Bogor: Business Innovation Center of Indonesia, 2003), hlm. 25-48.

3 Ascarya, "Sustainable Conventional And Islamic Microfinance Models For Micro Enterprises," *ISRA International Journal of Islamic Finance* 6, no. 2 (2014), hlm. 49-85.

lembaga Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan nama Baitul Mal Wat Tamwīl (BMT).

Pentingnya peranan LKMS, khususnya KJKS/ Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi dan BMT, terhadap kelangsungan para pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan bantuan permodalan, maka Muchtar dan Taufiq⁴ berinisiatif untuk menggambarkan sebuah peta baru mengenai potensi ekonomi pada lembaga tersebut dalam sebuah buku yang berjudul “100 Koperasi Besar Indonesia.” Selain menampilkan ranking 10 Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terbesar, juga membahas mengenai 10 KJKS terbesar di Indonesia, termasuk BMT. Adapun pemberian bobot menggunakan parameter kuantitatif dengan porsi yang proporsional. Pemberian bobot yang terbesar adalah pada volume usaha (45%). Sedangkan pada aset usaha bobotnya 30%, jumlah anggota bobotnya 20%, dan pelayanan sebesar 5%. 10 BMT terbesar yang dimaksud dalam buku ini adalah:

Tabel 2. 10 BMT Terbesar Menurut Buku 100 Koperasi Besar Indonesia.

No	Nama KJKS/BMT	Aset (Rp Juta)	Volume Usaha (Rp Juta)	Jml Nasabah (Orang)	Lokasi
1	UGT Sidogiri	406,199	1,825,059	3,689	Jatim
2	MMU-Pasuruan	112,087	497,806	1,701	Jatim
3	Bina Ummat Sejahtera	234,845	157,054	150,000	Jateng
4	KJKS Halal - Bontang	101,601	176,000	21,945	Kaltim
5	TAMZIS - Wonosobo	239,572	63,162	25,284	Jateng
6	KJKS Fastabiq Pati	96,444	110,167	1,247	Jateng
7	KJKS Beringharjo	48,376	63,210	33,927	DIY
9	BMT NU Sejahtera	55,214	38,432	53,889	Jateng
8	BMT Safinah Klaten	54,488	54,606	3,713	Jateng
10	BMT Marhamah-SMG	83,475	21,864	247	Jateng

Sumber: Muchtar dan Taufiq (2013).

Koperasi dan pondok pesantren sering kali dianggap bukan padanan yang cocok untuk disandingkan. Koperasi berada di ranah ekonomi dan duniawi, sedangkan pondok pesantren berada di ranah ilmu pengetahuan dan keagamaan. Berdasarkan data di atas, anggapan di atas hanya sebatas asumsi saja, karena sulit menemukan koperasi pondok pesantren yang mampu berprestasi ke tingkat Nasional. Munculnya BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri membuktikan bahwa para pengurus dan pengelola tersebut serius dalam mengembangkan sebuah jaringan perekonomian para santri yang berbasis koperasi.

4 Irsyad Muchtar dan Muhammad Taufiq, *100 Koperasi Besar di Indonesia*, (Jakarta: Peluang, 2013), hlm. 87.

BMT Pesantren mempunyai keunggulan jaringan yang luas, besar dan terpercaya sehingga dapat mengumpulkan dana murah dari masyarakat. Sehingga pemberdayaan BMT berbasis pesantren perlu dilakukan, hal ini didukung oleh jumlah pesantren di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan.⁵

Penelitian ini hadir dalam rangka mengkaji implikasi kebijakan apa yang harus ditempuh oleh para pemangku kebijakan tersebut atas dasar realitas, bahwa pesantren dengan berbagai potensi strategis yang dimilikinya, layak secara bisnis menjadi lokomotif penggerak ekonomi Islam di Indonesia. Di samping itu, walaupun perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ditandai dengan industri perbankan syariah yang berkembang pesat dan menunjukkan kontribusi positif bagi perekonomian domestik Nasional, namun pengembangan ekonomi Islam di pesantren belum optimal.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis tingkat efisiensi BMT Pesantren, menganalisis peran BMT Pesantren terhadap perkembangan pelaku UM yang menjadi nasabah BMT Pesantren, dan menganalisis peran BMT pesantren dalam mengelola harta UM.

Potensi Pesantren di Berbagai Bidang.

Di wilayah berbasis pesantren, masyarakat bisa mendirikan BMT dengan menggunakan badan hukum Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren). Dalam hal penggunaan Kopontren sebagai badan hukum BMT, BMT di Kopontren juga sebagai unit usaha otonom atau tempat pelayanan koperasi sebagaimana dalam KUD. Apabila di pesantren belum terbentuk Kopontren, maka civitas pesantren dapat mendirikan Kopontren dan BMT secara bersama-sama.⁶ Kelembagaan BMT yang tunduk pada badan hukum koperasi mengacu pada Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 dan secara spesifik diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 91 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Dewasa ini, banyak pesantren di Indonesia yang telah berusaha mengembangkan aktivitas ekonomi produktif, baik

⁵ Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, "Statistik Pendidikan Islam Tahun Ajaran 2014/2015," [pendis.kemenag.go.id, http://pendis.kemenag.go.id/ebook/ebook20142015/](http://pendis.kemenag.go.id/ebook/ebook20142015/), diakses pada 23 Mei 2019.

⁶ Atjep Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 10.

sebagai bagian dari aktivitas pendidikan para santrinya, maupun aktivitas pesantren dengan masyarakat. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan pada umumnya di bidang: Agribisnis (pertanian, peternakan, perkebunan), jasa (Koperasi, BMT, LAZIS, KBIH, percetakan), perdagangan (pertokoan, agen penjualan, pertokoan, ritel), serta Industri (pabrik roti, konveksi).

Salah satu pesantren yang mandiri dalam kegiatan perekonomiannya adalah Pesantren Al-Ittifaq di Ciwidey Bandung.⁷ Pesantren ini telah berhasil menjadi pesantren agribisnis di Indonesia. Selain sebagai produsen aneka sayur mayur, pesantren ini juga berperan sebagai pemasok hasil produksinya ke berbagai *super market* di Bandung, Bogor, Depok dan Jakarta. Dalam kegiatannya tersebut, pesantren melibatkan seluruh santri dalam proses produksinya.

Di sektor kehutanan, pesantren lain juga telah mandiri dalam kegiatan perekonomiannya, yaitu pesantren Cintawana di Singapatna, Tasikmalaya. Pesantren ini memiliki perhatian di sektor kehutanan. Bentuk keterlibatannya adalah membentuk kelompok tani berdasarkan letak lahan. Jumlah anggotanya 300 orang, terbagi di Desa Cilolahan, Suka Senang, dan Cikesal. Setiap desa memiliki satu koordinator dan alumni pesantren yang membantu kegiatan ini.⁸

Pesantren lain yang telah mandiri dalam kegiatan perekonomiannya adalah Pesantren Al-Amin di Prenduan Sumenep. Pesantren ini berhasil mengembangkan usaha bahari dengan produk berbagai aneka industri ikan laut yang dilakukan melalui usaha mandiri dan kerja sama dengan masyarakat nelayan dan juga para alumni yang sudah berhasil sebagai pengusaha pengolahan ikan laut.⁹ Selain itu, kemandirian ekonomi juga terdapat di Pesantren Darussalam Gontor di Ponorogo.¹⁰ Pesantren ini terkenal dengan wakafnya, telah berhasil dengan pengembangan ekonomi melalui usaha-usaha sektor ritel seperti mini market, wisma, toko

7 Muhammad Ghufron Hidayat, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Melakukan Pembiayaan Di Sektor Agribisnis (Studi Kasus BMT Miftahussalam Ciamis Dan Kopontrean Al-Ittifaq Bandung)," *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

8 Dian Diniyati, Eva Fauziyah, dan Budiman Achmad, "Potency And Role of The Moslem Boarding School As An Institution To Execute For Land And Forest Rehabilitation Activity," *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 7, no. 1 (2010), hlm. 41-54.

9 Rulyjanto Podungge, "Potensi BMT Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syariah di Masyarakat," *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014), hlm. 48-68.

10 Miftahul Huda, "Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo," *Jurnal Penelitian Keislaman* 6, no. 2 (2010), hlm. 419-444.

buku, toko roti, pengembangan koperasi pondok pesantren, hingga percetakan.

Demikian pula pesantren Sidogiri di Pasuruan,¹¹ telah berhasil melakukan pengembangan BMT. Dalam tempo 11 tahun BMT-UGT Sidogiri sudah membuka 120 cabang dan 16 cabang pembantu di berbagai kota di Jawa Timur. Jika dilihat berdasarkan staff per cabangnya, BMT UGT hanya memiliki 5 orang staff per cabang dari tahun 2007-2012 dengan aset yang dikelola per cabang sekitar Rp. 4,15 milyar.

Berdasarkan keragaman potensi ekonomi yang dimiliki oleh berbagai pondok pesantren di Indonesia, maka sangatlah tepat jika pesantren memiliki peran dalam menggerakkan sistem Ekonomi Islam. Salah satu unit usaha yang menjadi fundamental Ekonomi Islam dan merupakan aktifitas perekonomian umat adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Salah satu bentuk LKMS yang cocok dikembangkan oleh pesantren ialah BMT.

Menurut Podungge¹² terdapat beberapa alasan riil yang dikemukakan: *Pertama*, pesantren memiliki sejumlah santri yang merupakan pasar potensial dari sisi pendanaan bagi BMT melalui simpanan atau tabungan. *Kedua*, setiap pesantren memiliki pasar dengan pelaku ekonominya sendiri, yaitu santri, ustadz, dan masyarakat di lingkungan pesantren. Hal tersebut akan menunjang keberhasilan berbagai sektor usaha riil seperti kantin, mini market untuk kebutuhan sehari-hari, toko buku dan lain-lain. Aneka unit usaha tersebut mampu dikembangkan secara terpadu di bawah naungan BMT Pesantren. *Ketiga*, jaringan santri serta orang tua santri yang telah terjalin sangat potensial sebagai jaringan pemasaran BMT dan sektor riil yang dikembangkan oleh pesantren.

Adanya hubungan emosional yang mengikat antar orang tua, masyarakat, dan pesantren dapat diarahkan ke arah pengembangan bidang ekonomi untuk memajukan pesantren. Ketiga alasan di atas baru sebatas potensi umum yang dimiliki oleh hampir semua pesantren dan belum meliputi potensi-potensi ekonomi yang khas di lingkungan internal pesantren, serta potensi ekonomi di lingkungan pesantren yang pasti berbeda-beda.

BMT Pesantren berperan sebagai *pool of fund* antara pihak investor yang akan mengakumulasi hartanya dengan para pelaku UM dan kecil yang ingin menghasilkan harta dengan usaha yang

11 I. Muchtar dan M. Taufiq, *100 Koperasi Besar di Indonesia...*, hlm. 40.

12 Podungge, "Potensi BMT Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syariah'ah...,"

halal, maka BMT Pesantren menyediakan produk deposito dan tabungan. Produk ini dapat digunakan untuk tujuan pendidikan, pernikahan, qurban, aqiqah, haji dan lain-lain. Berbagai bentuk pendanaan yang disediakan BMT Pesantren ini sangat cocok digunakan oleh semua lapisan masyarakat.

Rangkuman Variabel Penelitian Terdahulu.

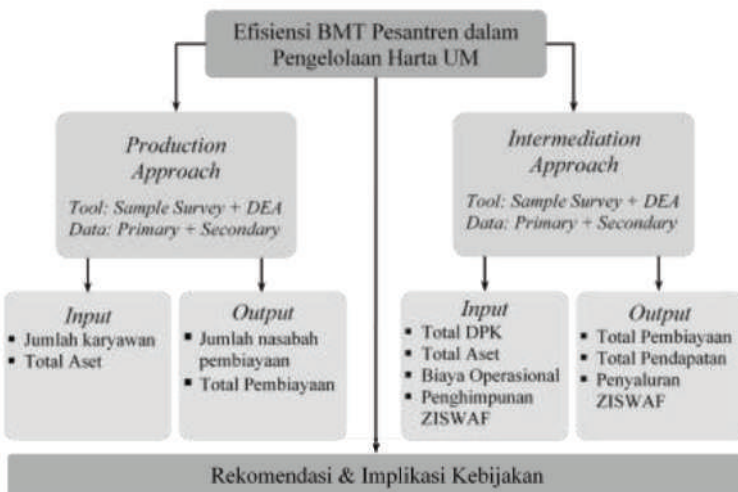
Definisi operasional variabel *input* dan *output* dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi serta hal-hal yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rangkuman Variabel Penelitian.

Input Produksi	
Jumlah karyawan	Jumlah seluruh karyawan pusat & cabang termasuk managerial & tata usaha pengurus <i>Bassem (2008); Haq, et al. (2010); Ahmad (2011); Kablan (2012); Abdelkader (2014)</i>
Total Aset	Jumlah aktiva tetap BMT <i>Bassem (2008); Ahmad (2011); Abdelkader (2014)</i>
Output Produksi	
Jumlah nasabah pembiayaan	Jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT <i>Bassem (2008); Hassan & Sanchez (2009); Haq, et al. (2010); Ahmad (2011); Kablan (2012); Jayamaha (2012);</i>
Total Pembiayaan	Total piutang (BBA), Pembiayaan (Musyarakah dan Mudharabah), Piutang (Murabahah) dan pinjaman (Qord dan lain-lain) <i>Qayyum & Munir (2008); Ahmad (2011); Kablan (2012); Kablan (2012); Jayamaha (2012); Ali & Ascarya (2010);</i>
Input Intermediasi	
Total DPK	Jumlah Tabungan (umum dan Mudharabah berjangka) <i>Abidin & Endri (2009); Ascarya & Yumanita (2009);</i>
Total Aset	Jumlah aktiva tetap <i>Abidin & Endri (2009); Ascarya & Yumanita (2009);</i>
Biaya Operasional BMT	Jumlah biaya operasional, termasuk biaya administrasi dan biaya tenaga kerja <i>Hassan & Sanchez (2009); Haq, et al. (2010); Abidin & Endri (2009); Ascarya & Yumanita (2009);</i>
Penghimpunan Dana ZISWAF	Jumlah dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf yang dihimpun BMT <i>Tambahan dari Penulis</i>
Output Intermediasi	
Total Pembiayaan	Total piutang (BBA), Pembiayaan (Musyarakah dan Mudharabah), Piutang (Murabahah) dan pinjaman (Qord dan lain-lain) <i>Qayyum & Munir (2008); Ahmad (2011); Kablan (2012);</i>
Total Pendapatan	Jumlah pendapatan baik pendapatan margin & bagi hasil juga pendapatan lainnya (provisi, lain-lain dan aktiva antar unit BMT) <i>Hassan & Sanchez (2009); Abidin & Endri (2009);</i>
Penyaluran Dana ZISWAF	Jumlah dana Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf yang disalurkan BMT <i>Tambahan dari Penulis</i>

Indikator Perkembangan Usaha Mikro	
Total Aset	Peningkatan total aset UM, ketika total aset meningkat melebihi kriteria yang ditentukan UU, maka UM naik kelas menjadi UK Widiyanto & Ismail (2008); Munizu (2010);
Omset Usaha	Peningkatan omset UM, ketika total omset meningkat melebihi kriteria yang ditentukan UU, maka UM naik kelas menjadi UK Widiyanto & Ismail (2008); Munizu (2010); Garoma (2012);
Jumlah tenaga kerja	Penambahan jumlah tenaga kerja UM, ketika jumlah tenaga kerja bertambah melebihi ketentuan yang ditetapkan, maka UM naik kelas menjadi UK Mead and Liedholm (1998); Widiyanto & Ismail (2008); Munizu (2010); Soini & Veseli (2011); Garoma (2012)
Tingkat pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan keluarga UM, ketika kualitas pendidikan keluarga UM meningkat, maka UM dikatakan lebih sejahtera Munizu (2010); Soini & Veseli (2011); Garoma (2012)
Tingkat Kesehatan	Peningkatan kualitas gizi dan kesehatan keluarga UM, ketika kualitas gizi dan kesehatan keluarga UM meningkat, maka UM dikatakan lebih sejahtera Widiyanto & Ismail (2008); Munizu (2010); Garoma (2012);

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan studi kasus yaitu BMT pesantren. Alasannya ialah potensi ekonomi Syariah yang melekat pada pondok pesantren, di antaranya: kekuatan jaringan alumni, *social capital* pesantren dan keberadaannya yang sangat dekat di masyarakat, sehingga akan mendorong pesatnya pertumbuhan BMT pesantren. Selain itu, pemilihan variabel penghimpunan dan penyaluran ZISWAF yang digunakan sebagai variabel input dan output intermediasi BMT pesantren. Sehingga kerangka penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Kerangka penelitian.

Metodologi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Bogor, Bandung, Solo, Yogyakarta dan Sidogiri, tempat adanya BMT pesantren yang mewakili masing-masing daerah. Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai dengan Desember 2015. Populasi penelitian adalah BMT yang berbasis pesantren di provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Mengingat data sebaran BMT yang ada di wilayah tersebut juga belum tersedia secara akurat, maka untuk mendapatkan jumlah sampel yang memadai dihitung berdasarkan informasi yang didapat dari beberapa sumber data, khususnya dari beberapa lembaga pembina BMT, seperti Inkopsyah dan Pinbuk. BMT yang dijadikan sampel meliputi BMT yang berbasis Pesantren tanpa ada batasan tertentu, baik secara wilayah operasional, *size asset* dan permodalan, jenis produk pelayanan keuangan mikro maupun sasaran pada sektor perekonomian (UM).

Populasi penelitian lanjutan adalah nasabah BMT yang berbasis pesantren yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur sesuatu yang seharusnya diukur. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 BMT pesantren. Sedikitnya jumlah sampel dalam penelitian ini disebabkan oleh daerah populasi amat luas dan terpencar-pencar, waktu penelitian yang tersedia tidak memadai, dana yang amat terbatas dan tenaga peneliti yang tidak mencukupi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah kuantitatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan non-parametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Metodologi ini digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi Unit Pengambil Keputusan (UPK), yaitu beberapa BMT Pesantren. Adapun pendekatan utama yang digunakan dalam studi ini yakni pendekatan produksi dan pendekatan intermediasi. Dengan pendekatan produksi, posisi BMT adalah sebagai pencipta dana pembiayaan dan dana sosial. Sementara dengan pendekatan intermediasi, posisi BMT adalah sebagai perantara. BMT mampu mengubah aset-aset keuangan dari unit-unit yang kelebihan dana ke unit yang kekurangan dana.

Studi efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis baik parametrik atau non-parametrik. Sebagian besar penelitian

lembaga keuangan menggunakan analisis non-parametrik *Data Envelopment Analysis* (DEA). Salah satu penggunaan analisis parametrik yaitu dengan pendekatan *Stochastic Frontier Analysis* (SFA) memiliki beberapa keterbatasan.¹³ Dibandingkan dengan SFA, DEA mampu menutupi kelemahan-kelemahan pendekatan analisis rasio keuangan, yaitu: rasio keuangan tidak mampu mempertimbangkan nilai-nilai keputusan manajemen di masa mendatang karena rasio keuangan hanya memberikan gambaran aggregate mengenai kinerja yang telah lalu dan kinerja di masa sekarang.¹⁴

Kablan¹⁵ menjelaskan bahwa dibandingkan dengan SFA, DEA tidak memerlukan hubungan fungsi tertentu antara *output* dan *input* produksi ataupun asumsi dari distribusi *error*. DEA membolehkan penggunaan banyak *input* dan *output*. DEA juga menghasilkan informasi detail mengenai nilai efisiensi unit, serta dapat menjelaskan Unit Pengambil Keputusan (UPK) mana saja yang paling banyak dijadikan referensi oleh UPK lainnya. Maka, DEA telah terbukti menjadi pendekatan yang sangat penting dalam menentukan strategi, kebijakan, dan mengatasi permasalahan operasional.¹⁶

DEA pertama kali diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978 dan 1979. Sejak saat itulah pendekatan ini banyak digunakan di dalam riset-riset operasional dan ilmu manajemen.¹⁷ Pendekatan ini lebih menekankan kepada evaluasi kinerja dari UPK. Analisis yang dilakukan berdasarkan pada evaluasi terhadap efisiensi relatif dari UPK yang sebanding, selanjutnya UPK-UPK yang efisien tersebut akan membentuk garis *frontier*. Jika UPK berada pada garis *frontier*, maka UPK tersebut dapat dikatakan efisien relatif dibandingkan dengan UPK yang lain dalam sampel penelitian. Selain itu, DEA juga menunjukkan unit-

13 Sandrine Kablan, "Microfinance efficiency in West African Economic and Monetary Union (WAEMU): Have Reforms Promoted Sustainability or Outreach?," *Savings and Development* 38, no. 1 (2014): 89.

14 Greg Gregoriou, Jean Messier, and Komlan Sedzro, "Assessing The Relative Efficiency of Credit Unionbranches Using Data Envelopment Analysis," *INFOR: Information Systems and Operational Research* 42, no. 4 (2004), hlm. 281-297.

15 Kablan, "Microfinance efficiency in West African Economic...,"

16 Richard S. Barr, Kory A. Killgo, Thomas F. Siems, and Sheri Zimmel, "Evaluating The Productive Efficiency and Performance of US Commercial Banks," *Managerial Finance* 28, no. 8 (2002), hlm. 3-25.

17 Cevdet Denizer, Mustafa Dinc, and Murat Tarimcilar, *Measuring Banking Efficiency in The Pre-and Post-liberalization Environment: Evidence From The Turkish Banking System* 2476 (World Bank Publications, 2000).

unit yang menjadi referensi bagi unit-unit yang tidak efisien.

$$\text{Efficiency of } DMU_0 = \frac{\sum_{k=1}^p \mu_k y_{k0}}{\sum_{i=1}^m v_i x_{i0}}$$

DMU = UPK

n = UPK yang akan dievaluasi

m = *Input-input* yang berbeda

p = *Output-output* yang berbeda

x_{ij} = Jumlah *input* i yang dikonsumsi oleh UPK_j

y_{kj} = Jumlah *output* k yang dikonsumsi oleh UPK_j

Semenjak tahun 1980-an, pendekatan ini banyak digunakan untuk mengukur tingkat efisinesi dari industri perbankan secara Nasional. Pendekatan DEA ini merupakan pendekatan non-parametrik, oleh sebab itu pendekatan ini tidak memerlukan asumsi-asumsi awal dari fungsi produksi. Namun, menurut Jemric dan Vujcic,¹⁸ kelemahannya adalah pendekatan ini sangat sensitif terhadap observasi-observasi ekstrim. Asumsi yang digunakan adalah tidak ada *random error*, deviasi dari *frontier* diindikasikan sebagai in-efisiensi.

Pengukuran efisiensi dengan metode DEA diawali dengan menentukan variabel-variabel *input* dan *output*. Selanjutnya menentukan orientasi model, apakah bertujuan untuk meminimalkan input atau memaksimalkan output. Hubungan variabel input dengan output apakah bersifat *constant return to scale* (CRS) atau *variable return to scale* (VRS) merupakan aspek yang penting dalam teknik DEA. Menurut Yumanita dan Ascarya,¹⁹ dua model inilah yang sering digunakan dalam metode DEA, yaitu model CCR dan model BCC. Model CSR dikembangkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama. Penambahan *input* sebesar x kali akan meningkatkan output sebesar x kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap UPK beroperasi pada skala yang optimal. Dengan demikian, efisiensi dengan model ini disebut juga dengan efisiensi *overall*, yakni efisiensi secara teknis dan skala. Rumus dari CRS dapat

18 Boris Vujcic and Igor Jemric, "Efficiency of Banks in Croatia: ADEA Approach," *Comparative Economic Studies* 44, no. 2/3 (2002), hlm. 169-194.

19 Ascarya dan Diana Yumanita, "Intermediation Efficiency Analysis of Islamic Rural Banks In Indonesia: Two Stage Dea Approach," *Centre for Central Bank Education and Studies Working Paper* (2009).

dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \max_{\mu_k, v_i} & \sum_{k=1}^p \mu_k y_{k0} \\ \text{s. t.} & \sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \\ & \sum_{k=1}^p \mu_k y_{kj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} \leq 0 \quad j = 1, \dots, n \\ & \mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon \quad \begin{array}{l} k = 1, \dots, p \\ i = 1, \dots, m \end{array} \end{aligned}$$

x_{ij} : Banyaknya jumlah *input* i yang dikonsumsi oleh UPK $_j$

y_{kj} : Banyaknya jumlah *output* k yang dikonsumsi oleh UPK $_j$

Di mana maksimalisasi di atas merupakan efisiensi teknis (CCR) dengan nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan satu. UPK yang dinilai efisiensinya kurang dari 1 berarti tidak efisien, sedangkan UPK yang nilai efisiensinya sama dengan angka 1 berarti UPK tersebut efisien.²⁰

Model *Variable Return to Scale* (VRS) ini, beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan *input* dan *output* itu berbeda (*variable return to scale*), artinya penambahan *input* sebesar x kali tidak akan menyebabkan *output* meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Kondisi dimana ia dapat menghasilkan *output* yang lebih besar disebut *Increasing Return to Scale* (IRS). Dan jika menghasilkan kurang dari jumlah x , maka disebut *Decreasing Return to Scale* (DRS). Rumus dari VRS dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \max_{\mu_k, v_i} & \sum_{k=1}^p \mu_k y_{k0} - \mu_0 \\ \text{s. t.} & \sum_{i=1}^m v_i x_{i0} = 1 \\ & \sum_{k=1}^p \mu_k y_{kj} - \sum_{i=1}^m v_i x_{ij} - \mu_0 \leq 0 \quad j = 1, \dots, n \\ & \mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon \quad \begin{array}{l} k = 1, \dots, p \\ i = 1, \dots, m \end{array} \end{aligned}$$

x_{ij} : Banyaknya jumlah *input* i yang dikonsumsi oleh UPK $_j$

y_{kj} : Banyaknya jumlah *output* k yang dikonsumsi oleh UPK $_j$

Maksimalisasi di atas merupakan nilai efisiensi teknis (BCC) dengan nilai efisiensi selalu kurang atau sama dengan satu. UPK yang nilai efisiensinya kurang dari satu berarti dinilai belum efisien

²⁰ Ascarya dan D. Yumanita, "Intermediation Efficiency Analysis of Islamic...", hlm. 37.

atau inefisien. Sedangkan UPK yang nilainya sama dengan satu dinilai efisien.²¹

Analisis Penelitian dan Pembahasan.

Terdapat lima BMT yang dijadikan sampel yaitu BMT Masalah Sidogiri, BMT Ta'awun Ngruki, BMT Al-Barakah Yogyakarta, BMT Al-Ghozaly Bogor dan BMT Daarut Tauhid Bandung dimana profilnya didapatkan dari tahun 2009-2014 kecuali BMT Al-Barakah dan BMT Al-Ghozaly yang dimulai pada tahun 2010. Beberapa indikator yang dapat dilihat untuk mengenali BMT lebih lanjut yaitu aset, modal anggota dan beberapa hal lainnya.

Tabel 5. Rangkuman Perhitungan Efisiensi Pendekatan Produksi.

CCR Model	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BMT	3	5	5	5	5	5
Jumlah BMT yang efisien			3	2	1	3
Rata-rata skor efisiensi	77.01	81.09	88.59	83.21	93.01	88.55
Rata-rata skor tidak efisien	77.01	81.09	71.47	77.98	91.26	71.38
% BMT yang tidak efisien	100%	100%	40%	60%	80%	40%

BCC Model	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BMT	3	5	5	5	5	5
Jumlah BMT yang efisien	1	2	3	2	1	3
Rata-rata skor efisiensi	93.11	88.98	89.45	86.79	95.73	96.51
Rata-rata skor tidak efisien	89.67	81.63	73.62	77.98	94.66	91.28
% BMT yang tidak efisien	67%	60%	40%	60%	80%	40%

Efisiensi Skala	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BMT	3	5	5	5	5	5
Jumlah BMT yang efisien			3	2	2	3
Rata-rata skor efisiensi	80.80	91.62	98.81	95.44	96.91	91.29
Rata-rata skor tidak efisien	80.80	91.62	97.02	95.44	96.91	91.29
% BMT yang tidak efisien	100%	100%	40%	60%	60%	40%

Berdasarkan tabel 5 terlihat bahwa pada tahun 2009 hanya ada 1 BMT pesantren yang mengalami efisiensi secara *pure-technical*, yaitu BMT Masalah. Pada tahun 2010 hanya ada 2 BMT pesantren yang juga mengalami efisiensi secara *pure-technical*, yaitu BMT Masalah dan BMT Barakah. Adapun BMT pesantren yang mengalami efisiensi secara teknis, *pure-technical* dan skala, yaitu BMT Masalah, BMT Ngruki dan BMT Barakah di tahun 2011, BMT Masalah dan BMT DT di tahun 2012, BMT Ngruki di tahun 2013, dan terakhir BMT Masalah, BMT Ghazaly dan BMT DT di tahun 2014. Selanjutnya BMT pesantren yang hanya mengalami efisiensi

²¹ Ascarya dan D. Yumanita, "Intermediation Efficiency Analysis of Islamic...", hlm. 39.

skala ialah BMT Ghozaly di tahun 2013.

Oleh sebab itu, dari periode 2009-2014 hanya terdapat 9 BMT pesantren atau 39% dari total BMT pesantren yang mengalami efisiensi secara teknis, *pure-technical* dan skala. Sementara 8,7% BMT pesantren hanya mengalami efisiensi secara *pure-technical*, dan 4,3% BMT pesantren yang hanya mengalami efisiensi skala. Sehingga sisanya 47,8% merupakan BMT pesantren yang belum efisien.

Artinya, selama periode tersebut, sebanyak 47,8% BMT pesantren belum menjalankan fungsi produksinya secara optimal, di mana BMT sebagai produsen dalam menghasilkan rekening pendanaan dan pembiayaan, serta mendefinisikan *output* sebagai jumlah dari rekening tersebut atau dari transaksi terkait yakni belum beroperasi optimal. Selain itu, BMT berperan sebagai produsen dalam menghasilkan dana sosial untuk pemberdayaan *mustahiq* serta mendefinisikan *output* sebagai jumlah dari para *mustahiq* yang telah terberdaya juga belum beroperasi secara optimal.

Tabel 6. Rangkuman Perhitungan Efisiensi Pendekatan Intermediasi.

CCR Model	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BMT	3	5	5	5	5	5
Jumlah BMT yang efisien	1	2	2	1	3	1
Rata-rata skor efisiensi	85.40	93.70	92.38	78.62	85.79	84.55
Rata-rata skor tidak efisien	78.10	91.32	88.94	79.25	78.69	82.28
% BMT yang tidak efisien	67%	60%	60%	80%	40%	80%

BCC Model	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BMT	3	5	5	5	5	5
Jumlah BMT yang efisien	1	3	4	3	4	4
Rata-rata skor efisiensi	95.04	98.92	97.55	95.92	95.90	94.99
Rata-rata skor tidak efisien	92.57	98.38	92.65	91.49	87.70	84.98
% BMT yang tidak efisien	67%	40%	20%	40%	20%	20%

Efisiensi Skala	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah BMT	3	5	5	5	5	5
Jumlah BMT yang efisien	1	2	3	2	3	1
Rata-rata skor efisiensi	89.40	94.69	94.42	82.68	89.05	88.43
Rata-rata skor tidak efisien	84.10	92.31	86.50	77.91	83.57	85.19
% BMT yang tidak efisien	67%	60%	40%	60%	40%	80%

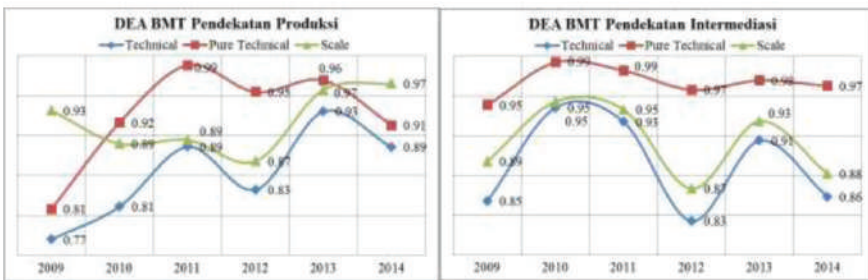
Berdasarkan tabel 6 terlihat bahwa kondisi BMT pesantren belum banyak menunjukkan kondisi efisien sepanjang periode yang diamati. Hasil di atas menunjukkan bahwa BMT pesantren yang mengalami efisiensi secara teknis, *pure technical*, dan skala, yaitu BMT Ngruki di tahun 2009, 2012 dan 2014, BMT Maslahah dan BMT Barakah di tahun 2010, BMT Ngruki dan BMT Ghozaly

di tahun 2011, serta BMT Masalahah, BMT Ngruki dan BMT DT di tahun 2013.

Sementara BMT pesantren yang mengalami efisiensi secara *pure-technical*, yaitu BMT Ngruki tahun 2010, BMT Masalahah dan BMT DT di tahun 2011, BMT Barakah dan Ghozaly di tahun 2012, BMT Ghozaly tahun 2013 serta BMT Masalahah, BMT Ghozaly dan BMT DT di tahun 2014. Oleh sebab itu, dari periode 2009 sampai dengan 2014 hanya terdapat 10 BMT pesantren atau 43% dari total BMT pesantren yang mengalami efisiensi secara teknis, *pure technical* dan skala. Sementara 39% BMT pesantren hanya mengalami efisiensi secara *pure-technical*. Sehingga sisanya yaitu 17% merupakan BMT pesantren yang belum efisien.

Artinya, selama periode tersebut, 17% BMT pesantren belum menjalankan fungsi sebagai perantara atau intermediasi secara optimal, dimana fungsi *baitut tamwīl* belum optimal dalam merubah dan mentransfer aset-aset finansial dari unit-unit surplus menjadi unit-unit defisit dan fungsi *baitul māl* juga belum optimal dalam menghimpun dan menyalurkan dana sosial, yaitu zakat, infaq, sadaqah dan wakaf. Padahal, BMT secara umum memiliki fungsi intermediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda. Karena, sistem kelembagaan, tata kelola, dan dukungan masyarakat maupun Pemerintah berbeda-beda di setiap daerah.

Berikut perbandingan efisiensi BMT pesantren di Indonesia dilihat efisiensi teknis, *pure-technical*, dan skala. Data yang diolah dan dibandingkan dalam hal ini adalah nilai rata-rata dari masing-masing efisiensi teknis, *pure-technical*, dan skala.

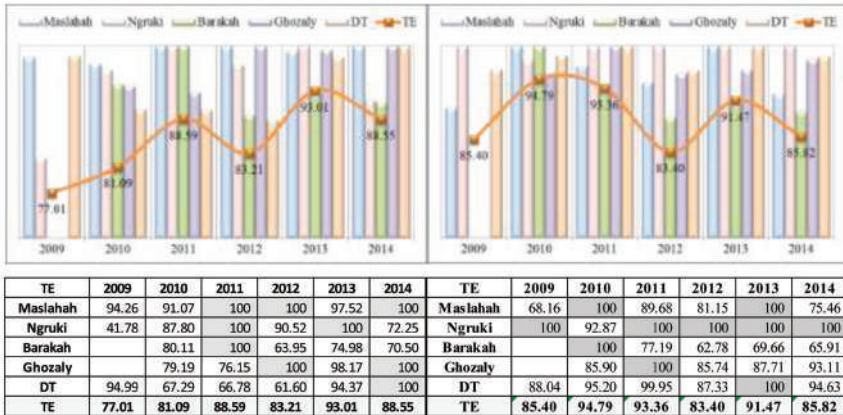


Gambar 2. Tingkat Efisiensi BMT Pesantren.

Dari gambar 2 diketahui bahwa sisi *pure-technical efficiency* BMT pesantren dengan pendekatan produksi di akhir tahun 2014 mengalami penurunan. Pada periode 2009-2011 keseluruhan kinerja sebagai intermediasi lebih efisien dari pada sebagai produsen.

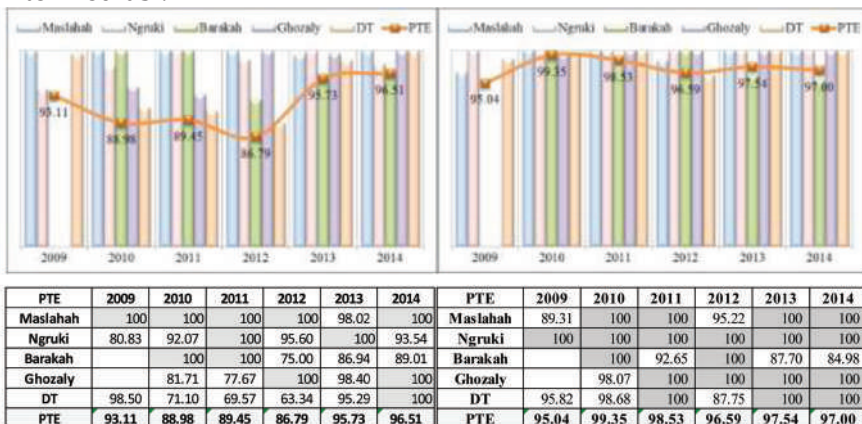
Sedangkan mulai 2012-2014, fungsi sebagai produsen lebih efisien dari pada fungsi intermediasi, kecuali peningkatan *pure-technical efficiency* lebih efisien di tahun 2014.

Dari hasil pengolahan data tingkat efisiensi, diperoleh rata-rata pada pendekatan produksi adalah 90%. Sedangkan rata-rata pada pendekatan intermediasi adalah 93%. Maka, secara keseluruhan BMT Pesantren lebih efisien sebagai intermediasi. Sementara itu, secara keseluruhan terjadi penurunan tingkat efisiensi.



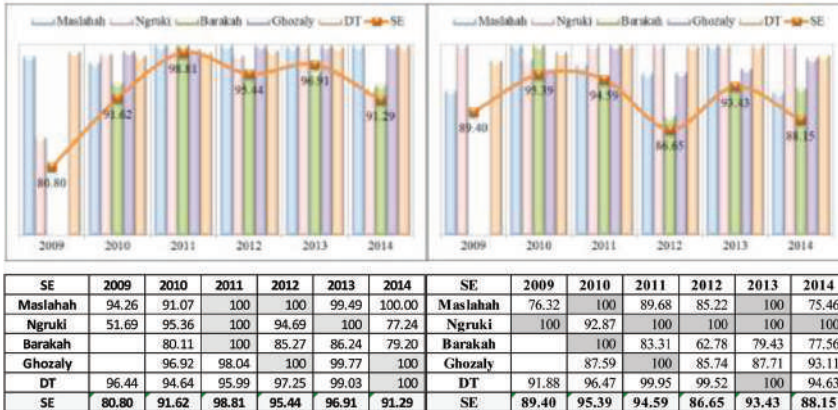
Gambar 3. *Technical Efficiency* Produksi (kiri) dan Intermediasi (kanan).

Dari gambar 3 di atas menggambarkan bahwa di periode 2009-2012 tingkat efisiensi teknis BMT Pesantren melalui pendekatan intermediasi yang sempat menyentuh 94.79%, jauh lebih efisien dibandingkan dengan tingkat efisiensinya sebagai produsen. Namun, tidak di periode 2013 dan 2014, dimana BMT Pesantren lebih efisien berperan sebagai produsen daripada sebagai lembaga intermediasi.



Gambar 4. *Pure-Technical Efficiency* Produksi (kiri) dan Intermediasi (kanan).

Dari gambar 4 di atas menggambarkan bahwa, selama periode penelitian, tingkat efisiensi *pure-technical* melalui pendekatan intermediasi sempat menyentuh 99.35% selalu jauh lebih efisien dibandingkan dengan tingkat efisiensinya sebagai produsen.



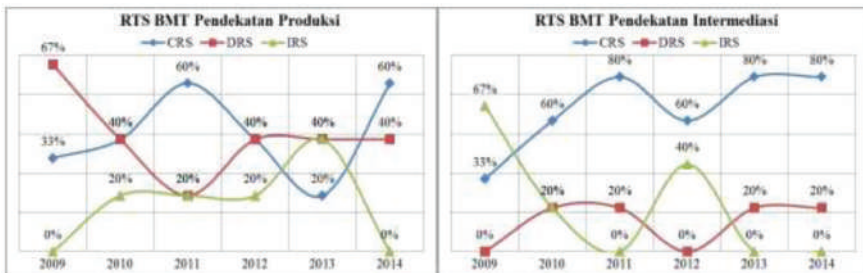
Gambar 5. *Scale Efficiency* Produksi (kiri) dan Intermediasi (kanan).

Dari gambar 5 di atas menggambarkan bahwa di periode 2009-2010 tingkat efisiensi teknis dengan pendekatan intermediasi 95.39% lebih efisien dibandingkan dengan tingkat efisiensi sebagai produsen. Namun tidak di periode 2011-2014, BMT pesantren lebih efisien sebagai produsen dari pada sebagai lembaga intermediasi sebesar 96.91%.

Metode DEA bukan hanya mampu melihat DMU mana yang efisien dan tidak efisien, akan tetapi juga bisa digunakan untuk mengukur dan memastikan DMU sudah melakukan peningkatan kapasitas produksinya atau tidak. Dalam hal ini, setiap tahunnya DMU akan memiliki salah satu dari tiga kondisi *constant return to scale* (CRS), yaitu: *increasing return to scale* (IRS), yakni keadaan ketika ada perubahan atau penambahan pada 1% unit *input* tertentu, maka mengakibatkan perubahan pada *output* yang besarnya lebih dari 1%. Kemudian, *constant return to scale* (CRS) yang dipahami dengan keadaan ketika ada perubahan atau penambahan pada 1% unit *input* tertentu, maka mengakibatkan perubahan pada *output* yang besarnya sama dengan persentasi perubahan *input*. Selanjutnya, *decreasing return to scale* (DRS), yakni keadaan ketika ada perubahan atau penambahan pada 1% unit *input* tertentu, maka mengakibatkan perubahan pada *output* yang besarnya kurang dari persentasi perubahan *input* tersebut.

Berikut adalah perbandingan kondisi CRS, IRS maupun DRS BMT pesantren pada periode penelitian 2009–2014. Dilihat dari pendekatan produksi pada tahun 2009, 1 dari 3 (33%) BMT pesantren yang diamati dalam keadaan CRS. Sedangkan sisanya sebesar 67% atau sejumlah 2 BMT pesantren dalam keadaan DRS.

Pada tahun 2010, terdapat masing-masing 2 dalam keadaan CRS (40%), DRS (40%), serta sisanya yaitu 1 yang mengalami IRS (20%). Hal yang sama juga ditunjukkan tahun 2012. Pada tahun 2011, terdapat masing-masing 1 yang mengalami IRS (20%), DRS (20%), serta sisanya 3 yang mengalami CRS (60%). Pada tahun 2013, masing-masing 2 BMT pesantren mengalami IRS (40%), DRS (40%), dan sisanya 1 yang mengalami CRS (20%). Pada tahun 2014, 3 dari 5 yang mengalami CRS dan 2 BMT pesantren lainnya dalam keadaan DRS.

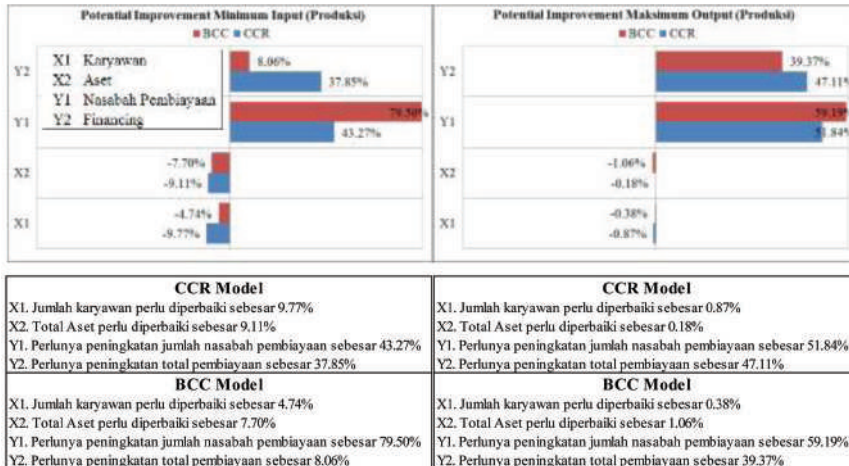


Gambar 6. Return to Scale BMT Pesantren.

Dilihat dari pendekatan intermediasi (gambar 6. kanan), pada tahun 2009, 2 dari 3 (67%) dalam keadaan IRS dan 33% dalam keadaan CRS. Pada tahun 2010, masing-masing 1 BMT pesantren dalam keadaan DRS (20%), IRS (20%), serta sisanya 3 mengalami CRS (60%). Pada tahun 2011, terdapat 4 dari 5 mengalami CRS (80%) dan sisanya 1 yang mengalami DRS. Pada tahun 2012, terdapat 2 dari 5 yang mengalami IRS (40%) dan 3 lainnya mengalami CRS (20%). Pada tahun 2013, hanya terdapat 1 BMT pesantren yang mengalami DRS (20%) dan 4 lainnya dalam keadaan CRS (80%).

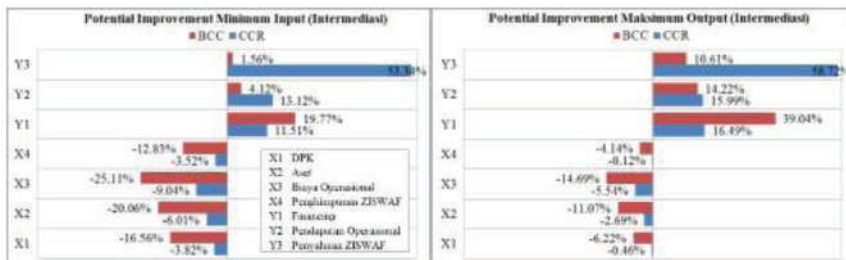
Dari penjelasan tersebut, terdapat perbedaan yang bervariasi antara pendekatan produksi dan intermediasi. Namun, setiap tahunnya selalu ada stagnasi pada BMT pesantren yang mengalami penurunan efisiensi. Bahkan di tahun 2014 semua BMT pesantren tidak ada yang berada di posisi IRS. Ini artinya, jumlah nasabah pembiayaan dan total pembiayaan harus dapat ditingkatkan. Di samping itu, jumlah karyawan dan total aset masih dapat ditekan.

Berikut rangkuman potensi pengembangan BMT pesantren dilihat dari *input* dan *output* model berdasarkan pendekatan produksi.



Gambar 7. Potensi Perbaikan Efisiensi BMT Pesantren Pendekatan Produksi.

Pada tahun 2014 total pembiayaan memiliki potensi pengembangan sebesar 37.85%, maka *output* tersebut masih dapat ditingkatkan efisiensinya dengan peningkatan jumlah pembiayaan sebesar 37.85% dari nilai rata-rata pembiayaan per bulan pada tahun tersebut. Dalam hal ini, potensi pengembangan *input* dilihat secara negatif, sedangkan *output* dilihat secara positif. Artinya, pada tahun 2014 jumlah karyawan memiliki potensi pengembangan sebesar 9.77%, maka *input* tersebut masih dapat ditingkatkan efisiensinya dengan pengurangan jumlah karyawan sebesar 9.77% dari rata-rata jumlah karyawan per periode pada tahun tersebut. Sebaliknya, untuk memaksimalkan *output* dengan *input* yang sewajarnya, maka pengurangan jumlah karyawan hanya sebesar 0.87% dari rata-rata jumlah karyawan per periode pada tahun tersebut.



CCR Model	CCR Model
X1. Total DPK perlu diperbaiki sebesar 3.82%	X1. Total DPK perlu diperbaiki sebesar 0.46%
X2. Total Aset perlu diperbaiki sebesar 6.01%	X2. Total Aset perlu diperbaiki sebesar 2.69%
X3. Biaya operasional perlu diperbaiki sebesar 9.04%	X3. Biaya operasional perlu diperbaiki sebesar 5.54%
X4. Penghimpunan dana ZISWAF perlu diperbaiki sebesar 3.52%	X4. Penghimpunan dana ZISWAF perlu diperbaiki sebesar 0.12%
Y1. Perlunya peningkatan total pembiayaan sebesar 11.51%	Y1. Perlunya peningkatan total pembiayaan sebesar 16.49%
Y2. Perlunya peningkatan pendapatan operasional sebesar 13.12%	Y2. Perlunya peningkatan pendapatan operasional sebesar 15.99%
Y3. Perlunya peningkatan penyaluran dana ZISWAF sebesar 53.34%	Y3. Perlunya peningkatan penyaluran dana ZISWAF sebesar 58.72%
BCC Model	BCC Model
X1. Total DPK perlu diperbaiki sebesar 16.56%	X1. Total DPK perlu diperbaiki sebesar 6.22%
X2. Total Aset perlu diperbaiki sebesar 20.06%	X2. Total Aset perlu diperbaiki sebesar 11.07%
X3. Biaya operasional perlu diperbaiki sebesar 25.11%	X3. Biaya operasional perlu diperbaiki sebesar 14.69%
X4. Penghimpunan dana ZISWAF perlu diperbaiki sebesar 12.83	X4. Penghimpunan dana ZISWAF perlu diperbaiki sebesar 4.14%
Y1. Perlunya peningkatan total pembiayaan sebesar 19.77%	Y1. Perlunya peningkatan total pembiayaan sebesar 39.04%
Y2. Perlunya peningkatan pendapatan operasional sebesar 4.12%	Y2. Perlunya peningkatan pendapatan operasional sebesar 14.22%
Y3. Perlunya peningkatan penyaluran dana ZISWAF sebesar 1.56%	Y3. Perlunya peningkatan penyaluran dana ZISWAF sebesar 10.61%

Gambar 8. Potensi Perbaikan Efisiensi BMT Pesantren Intermediasi.

Sedangkan berdasarkan hasil pengolahan data pada gambar 8, bahwa total pembiayaan pendapatan operasional dan penyaluran dana ZISWAF harus dapat ditingkatkan sebesar masing-masing 11.51%, 13.12%, dan 53.34% untuk memperbaiki nilai efisiensinya. Begitu pula dari sisi *input*, yaitu: total DPK, total aset, biaya operasional dan penghimpunan ZISWAF masih dapat ditekan untuk meningkatkan efisiensi sebesar masing-masing 3.82%, 6.01%, 9.04%, dan 3.52%. Maka, potensi pengembangan BMT pesantren berdasarkan pendekatan intermediasi, yaitu: pada tahun 2014 total penyaluran ZISWAF memiliki potensi pengembangan sebesar 53.34%, maka *output* tersebut masih dapat ditingkatkan efisiensinya.

Interpretasi potensi pengembangan *input* dengan pendekatan intermediasi juga dilihat secara negatif. Jika pada tahun 2014 biaya operasional memiliki potensi pengembangan sebesar 9.04%, maka *input* tersebut masih dapat ditingkatkan dengan pengurangan jumlah biaya operasional sebesar 9.04% dari rata-rata jumlah biaya operasional per periode pada tahun tersebut. Sebaliknya, untuk memaksimalkan *output* dengan *input* yang sewajarnya, maka pengurangan biaya operasional sebesar 5.54% dari rata-rata biaya operasional per periode pada tahun tersebut.

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan.

Peran BMT pesantren dalam membuka akses permodalan bagi pelaku UM maupun UK di sekitar pesantren telah menjadikan lembaga ini menjadi industri yang memainkan peran yang sangat signifikan. Namun, secara kelembagaan dan operasional BMT pesantren memerlukan pembenahan, khususnya pada aspek tata kelola industri dan aspek internal, seperti operasional dan manajemen.

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan selama kurang lebih 4 bulan, ada beberapa temuan: hasil menunjukkan bahwa BMT pesantren belum menunjukkan tingkat efisiensi yang memuaskan, baik dengan pendekatan produksi maupun intermediasi. Hal ini salah satunya disebabkan oleh keterbatasan data yang tersedia di masing-masing BMT pesantren. BMT pesantren secara keseluruhan lebih efisien berperan dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi daripada fungsi produksinya dan memberikan kinerja efisiensi yang terbaik sebagai lembaga keuangan yang mampu mendukung dengan maksimal pembiayaan para pelaku UM di daerah sekitar pesantren khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, keduanya berpotensi dikembangkan untuk mencapai kondisi yang lebih efisien. Dalam pendekatan produksi, jumlah nasabah pembiayaan dan total pembiayaan harus dikembangkan lagi. Begitu pula dalam pendekatan intermediasi, pendapatan operasional dan penyaluran dana ZISWAF masih dapat ditingkatkan lagi.

Dalam situasi perekonomian yang tidak stabil, sangat sulit sekali untuk memprediksi apa yang akan terjadi karena segala sesuatu terjadi dengan pola yang beragam. Oleh sebab itu, pengukuran efisiensi DEA muncul sebagai alat analisis pengambilan keputusan strategik masing-masing BMT pesantren khususnya, dan pengambilan keputusan para pemangku kebijakan pada umumnya dalam meningkatkan pertumbuhan LKMS di Indonesia.

Beberapa implikasi manajerial yang menyajikan kebijakan-kebijakan berdasarkan hasil temuan penelitian ini antara lain:

Kelembagaan dan operasional BMT pesantren sangat membutuhkan pembenahan dan peningkatan operasional. Oleh sebab itu diperlukan standar operasional dan regulasi sebagai pedoman dalam menjaga keberlanjutan BMT pesantren. Pemerintah bisa mereplika standar operasional dan regulasi yang diterapkan oleh BMT pada umumnya kepada BMT pesantren.

Memiliki anggota atau nasabah pendanaan (simpanan) yang dominan dari sektor UMK, dimana perilaku usahanya masih erat hubungannya dengan perilaku ekonomi keluarga, membuat BMT pesantren berada pada risiko likuiditas yang sangat rentan. Oleh sebab itu diperlukan mekanisme dalam mengatasi risiko likuiditas ini. Atau secara kelembagaan dibutuhkan lembaga yang mampu berperan secara baik menjadi lender of last resort. Walaupun beberapa BMT

pesantren telah ada yang menjadikan pondok pesantrenya sebagai *lender of last resort*, akan tetapi akan merepotkan apabila secara terus-menerus menggunakan dana pondok pesantren. Sehingga peran pemerintah dan asosiasi BMT lokal di daerah-daerah dapat diberdayakan secara formal dalam memainkan peran tersebut.

Selain peran *lender of last resort* untuk mengatasi risiko likuiditas, BMT pesantren juga sangat memerlukan program linkage yang lebih sistematis dan teregulasi dengan baik. Oleh sebab itu dibutuhkan koordinasi antara lembaga regulator industri keuangan. Selain itu perlu membuat kebijakan yang jelas dan praktis perihal kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah, khususnya untuk meningkatkan modal, baik dalam bentuk *executing, channelling, join financing*, dan kerjasama jasa keuangan lainnya.

Perlu juga memaksimalkan keberadaan asosiasi BMT lokal sebagai lembaga penyedia informasi kelayakan BMT pesantren dalam rangka *linkage* program antara BUS/UUS/BPRS/LKNB lainnya dengan BMT pesantren. Oleh karena itu dibutuhkan program-program nyata yang akan memacu kinerja BMT pesantren, sehingga menjadi lembaga yang menarik untuk dijadikan mitra.

Hasil analisis berdasarkan pendekatan DEA ini dapat dijadikan *second opinion* bagi regulator, pengawas, atau pemeriksa LKMS dalam rangka menganalisis kondisi BMT baik secara individual maupun agregat untuk melihat kondisi BMT dari pendekatan yang lain. Sehingga dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dalam rangka pengambilan kebijakan selanjutnya.

Langkah ke depan juga perlu diidentifikasi secara bersama-sama baik antara regulator, praktisi maupun pengamat, untuk mendefinisikan fungsi dan peran BMT khususnya BMT pesantren di dalam perekonomian nasional, sehingga spesifikasi *input* dan *output* yang ada dapat mendekati kondisi yang ideal.

Daftar Pustaka.

- Abidin Zaenal, dan Endri. "Kinerja Efisiensi Teknis Bank Pembangunan Daerah: Pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA)." *Akuntansi dan Keuangan* 11, no. 1 (2009): 21-29.

- Ahmad, Usman. "Efficiency Analysis of Microfinance Institutions in Pakistan." *Munich Personal RePEc Archive* (2011).
- Ali, Muhammad Mahbubi, dan Ascarya. "Analisis Efisiensi Baitul Maal wat Tamwil dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri)." *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 5, no. 2 (2014): 110-125.
- Ariyaratna, Jayamaha. "Efficiency of small financial institutions in Sri Lanka using data envelopment analysis." *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences* 3, no. 5 (2012): 572-580.
- Ascarya dan Diana Yumanita. "Intermediation Efficiency Analysis of Islamic Rural Banks In Indonesia: Two Stage Dea Approach." *Centre for Central Bank Education and Studies Working Paper* (2009).
- Ascarya. "Sustainable Conventional And Islamic Microfinance Models For Micro Enterprises." *ISRA International Journal of Islamic Finance* 6, no. 2 (2014): 49-85.
- Barr, Richard S., Kory A. Killgo, Thomas F. Siems, and Sheri Zimmer. "Evaluating The Productive Efficiency and Performance of US Commercial Banks." *Managerial Finance* 28, no. 8 (2002): 3-25.
- Bassem, Ben Soltane. "Efficiency of Microfinance Institutions in the Mediterranean: An Application of DEA." *Transition Studies Review* 15, no. 2 (2008): 343-354.
- Ben Abdelkader, Ines, Salem Hathroubi, and Mohamed Mekki Ben Jemaa. "Microfinance Institutions' Efficiency in the MENA Region: a Bootstrap-DEA Approach." *Research Journal of Finance and Accounting* 5, no. 6 (2014): 179-191.
- Denizer, Cevdet, Mustafa Dinc, and Murat Tarimcilar. *Measuring Banking Efficiency in The Pre-and Post-liberalization Environment: Evidence From The Turkish Banking System* 2476. (World Bank Publications, 2000).
- Diniyati, Dian, Eva Fauziyah, dan Budiman Achmad. "Potency And Role of The Moslem Boarding School As An Institution To Execute For Land And Forest Rehabilitation Activity." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan* 7, no. 1 (2010): 41-54.
- Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. "Statistik Pendidikan Islam Tahun Ajaran 2014/2015." [pendis.kemenag.go.id.](http://pendis.kemenag.go.id/), 2015, <http://pendis.kemenag.go.id/ebook/ebook20142015/>.

- Djazuli, Atjep, dan Yadi Januari. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat: Sebuah Pengenalan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Garoma, Belay File. *Determinants of Microenterprise Success in the Urban Informal Sector of Addis Ababa: A Multidimensional Analysis*. Erasmus University Rotterdam, 2012.
- Gregoriou, Greg, Jean Messier, and Komlan Sedzro. "Assessing The Relative Efficiency of Credit Unionbranches Using Data Envelopment Analysis." *INFOR: Information Systems and Operational Research* 42, no. 4 (2004): 281-297.
- Haq, Mamiza, Michael Skully, and Shams Pathan. "Efficiency of Microfinance Institutions: A Data Envelopment Analysis." *Asia-Pacific Financial Markets* 17, no. 1 (2010): 63-97.
- Hassan, Kabir M., and Benito Sanchez. "Efficiency Analysis of Microfinance Institutions In Developing Countries." *Networks Financial Institute Working Paper* 12 (2009).
- Hidayat, Muhammad Ghufon. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Melakukan Pembiayaan Di Sektor Agribisnis (Studi Kasus BMT Miiftahussalam Ciamis Dan Kopontrean Al-Ittifaq Bandung)." Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Huda, Miftahul. "Fundraising Wakaf Pesantren Tebuireng Jombang dan Gontor Ponorogo." *Jurnal Penelitian Keislaman* 6, no. 2 (2010): 419-444.
- Ismail, Abdul Ghafar, Widiyanto Mislana Condro. "Sustainability of BMT Financing for Developing Micro Enterprises." *Munich Personal RePEc Archive* (2008): 1-30.
- Kablan, Sandrine. "Microfinance efficiency in West African Economic and Monetary Union (WAEMU): Have Reforms Promoted Sustainability or Outreach?." *Savings and Development* 38, no. 1 (2014): 89.
- Kementrian Koperasi Dan UKM. "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2017-2018." depkop.go.id, 2018, <https://tinyurl.com/ydep44lf>.
- Mead, Donald C., and Carl Liedholm. "The dynamics of micro and small enterprises in developing countries." *World Development* 26, no. 1 (1998): 61-74.
- Muchtar, Irsyad, dan Muhammad Taufiq. *100 Koperasi Besar di Indonesia*. Jakarta: Peluang. 2013.

- Munizu, Musran. "Pengaruh faktor-faktor eksternal dan internal terhadap kinerja usaha mikro dan kecil (UMK) di Sulawesi Selatan." *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2010): 33-41.
- Podungge, Rulyjanto. "Potensi BMT Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syaria'ah di Masyarakat." *Al-Mizan* 10, no. 1 (2014): 48-68.
- Qayyum, Abdul, and Munir Ahmed. "Efficiency and Sustainability of Microfinance." *Munich Personal RePEc Archive* (2006).
- Setijawan, Edi, dan M. E. Siregar. "Peran Perbankan Syariah dalam Pengembangan Sektor Usaha Kecil dan Mikro." *Bunga Rampai Lembaga Keuangan Mikro*. Bogor: Business Innovation Center of Indonesia, 2003.
- Vujcic, Boris, and Igor Jemric. "Efficiency of Banks in Croatia: ADEA Approach." *Comparative Economic Studies* 44, no. 2/3 (2002): 169-194.